



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15609-15623
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Era Kolonialisme Belanda dan Jepang di Indonesia

Syarifah^{1✉}, Rosmaida Sinaga², Ida Maria Sidauruk³, Rayhan Harahap⁴, Marhenta Nababan⁵, Halimatu Syadiah Siregar⁶

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: idamariasidauruk1908@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan pendidikan pada era kolonialisme Belanda dan Jepang di Indonesia. Jurnal ilmiah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan informasi faktual guna memperoleh kesimpulan yang bermakna tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Tujuan dari pendekatan penelitian sejarah adalah untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan tidak memihak. Menurut perkembangannya sebelum Indonesia merdeka, pendidikan di Indonesia mengalami dua masa dalam penyelenggaraannya, yaitu pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang. Dari dua periode perjalanan pendidikan Indonesia, masing-masing mempunyai gaya pelaksanaan tersendiri. Pada masa penjajahan Belanda, ciri-ciri yang terbentuk dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bertahap, dualisme, pengawasan terpusat yang kuat, asas konkordansi dan pendidikan pribumi yang tidak sistematis. Penyelenggaraan pendidikan tersebut mendapat tentangan dari para tokoh pendidikan Indonesia yang kemudian menyelenggarakan pendidikan bagi penduduk asli sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian penduduk asli. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dilaksanakan dengan disiplin militer karena pemerintahan pada masa pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer. Kedatangan Jepang ke Indonesia dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya sehingga Jepang membentuk anak-anak Indonesia agar siap terlibat dalam perang tersebut. Cara yang digunakan Jepang adalah dengan memasukkan doktrin militer dalam setiap pelaksanaan pendidikannya. Selain itu, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda sehingga Jepang mengambil kebijakan untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Sejarah, geografi, dan budaya Jepang perlahan-lahan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran bagi penduduk asli.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Kolonialisme Belanda, Kolonisasi Jepang*

Abstract

The aim of this research is to compare educational policies in the era of Dutch and Japanese colonialism in Indonesia. This scientific journal was written using a historical research approach. The historical method is a systematic approach used to analyze and interpret factual information in order to obtain meaningful conclusions about important events that occurred in the past. The aim of the historical research approach is to reconstruct the past systematically and impartially. According to its historical development before Indonesia's independence, education in Indonesia experienced two periods in its implementation, namely education during the Dutch colonial period and the Japanese occupation. Of the two periods of Indonesia's educational journey, each had its own style of implementation. During the Dutch colonial period, the characteristics that were formed in the administration of education were gradualism, dualism, strong centralized supervision, the principle of concordance and unsystematic education for natives. The implementation of such education met with opposition from Indonesian educational figures who then organized education for natives according to native needs and personalities. During the Japanese occupation, education was implemented with military discipline because the government under Japanese occupation was a military government. Japan's arrival to Indonesia was in order to win the Greater East Asia War so that Japan formed Indonesian children to be ready to be involved in the war. The method used by Japan is to include military doctrine in every implementation of its education. Apart from that, Japan prohibited the use of Dutch so Japan made a policy to perfect Indonesian. History, geography and Japanese culture are slowly being included in the learning curriculum for natives.

Keywords: Education *Policy, Dutch Colonialism, Japanese Colonization*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai daya tarik yang begitu indah di mata negara-negara barat, Indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, berbagai macam rempah-rempah dan hasil pertanian dapat diperoleh dengan mudah diseluruh pelosok nusantara. Hal ini membuat negara-negara barat berkunjung ke nusantara, kapal dagang dari berbagai negara pun berdatangan, antara lain Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda. (Harkantiningasih, 2013) niaga pada awalnya diatur oleh para raja dan bangsawan nusantara pada masa itu, pada awal abad ke 16 lautan nusantara didominasi oleh kapal asing sehingga menjadikan persaingan niaga menjadi tidak sehat. Tujuan awal datangnya koloni asing untuk berdagang berubah menjadi kolonialisme. (Harkantiningasih, 2014) Negara jajahan asing banyak menetapkan peraturan, sehingga kekuasaan nusantara bisa diatur oleh penjajah, hal ini berdampak pada banyak sektor, baik sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan nusantara. (Ramadhani S, 2021)

Pada abad ke-20, Indonesia menyaksikan masa kolonialisme berkepanjangan yang dilakukan negara-negara Eropa dan Jepang. Pada masa kolonial ini, pendidikan di Indonesia

mengalami transformasi yang signifikan. Pada masa Kolonial Kedua, khususnya masa penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum pendudukan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia dikuasai oleh sistem sekolah Belanda yang bersifat elit dan restriktif. Pendidikan diberikan secara eksklusif kepada masyarakat tertentu dan tujuannya adalah untuk menghasilkan pegawai pemerintah yang loyal terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Namun pada masa penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar dengan semakin luasnya kesempatan pendidikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Selain itu, kolonialisme Jepang juga menanamkan gagasan-gagasan baru pada lembaga pendidikan, seperti pendidikan vokasi yang bercita-cita menghasilkan tenaga kerja terampil dan mandiri. Pendidikan vokasi inilah yang menjadi landasan keberhasilan industri di Indonesia pada masa kemerdekaan. Namun kebangkitan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang juga mempunyai sisi negatif. Pendidikan difokuskan untuk mendukung tujuan Jepang dan mengikis identitas nasional Indonesia. Selain itu, sekolah pada masa pendudukan Jepang juga banyak menggunakan bahasa Jepang dan melakukan diskriminasi terhadap bahasa daerah.

Pada masa Jepang, pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan Jepang yang bertujuan untuk menghapuskan pelajaran agama Islam dan menggantikannya dengan pelajaran agama Shinto, sehingga frekuensi bahasa dan aksara Arab dikurangi, dan pendidikan pada umumnya ditekankan. Karena Jepang menyadari ingin mencerdaskan bangsa Indonesia melalui pendidikan dan Jepang pun merevisi kurikulum pendidikannya (Abbas, 2018: 64-69). Menurut (Purwanti, 2018) tujuan dari cabang pendidikan ini adalah agar siswa dapat menggunakan bahasa barat di seluruh Indonesia. Khususnya dalam bidang pendidikan, secara aktif berorientasi pada penanaman aturan militer Jepang pada pembentukan semangat Bushido (tata cara ksatria). Jadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, proses Jepangisasi juga diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Semangat Bushido ditanamkan untuk membangun rasa hormat terhadap pemerintahan militer Jepang. Oleh karena itu, para sarjana tertarik untuk menyelidiki persamaan antara kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Belanda dengan pemerintahan Jepang.

METODE PENELITIAN

Jurnal ilmiah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian sejarah. Metode sejarah adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan informasi faktual guna memperoleh kesimpulan yang bermakna tentang peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Tujuan dari pendekatan penelitian sejarah adalah

untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan tidak memihak. Tahapan penelitian metode sejarah dikategorikan dalam empat tahapan kerja yang berbeda-beda. Fase awal adalah heuristik. Heuristik merupakan tahap awal yang dilakukan ketika topik kajian telah diidentifikasi. Heuristik adalah prosedur sistematis untuk menemukan, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik utama. Heuristik dalam konteks pencarian sumber terutama melibatkan pemeriksaan sumber tertulis (seperti studi literatur), sumber objek, dan sumber lisan. Sumber tertulis seperti arsip, sumber cetak resmi, dokumen, novel, dan lain-lain digunakan untuk memperoleh data yang sesuai untuk penyusunan publikasi ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendidikan Indonesia di Masa Kolonial Belanda

Sistem pendidikan kolonial Belanda, khususnya pada abad ke-20, memiliki kebutuhan yang signifikan terhadap individu dengan tingkat pendidikan tinggi. Tuntutan ini berkaitan dengan perubahan dan peremajaan banyak bidang kehidupan di dunia. Perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan di sektor perekonomian selama abad ke-20, sebagai hasil dari perubahan dan reformasi yang terjadi. Untuk mengimbangi pesatnya ekspansi organisasi-organisasi Eropa, sangatlah penting untuk memiliki personel yang berpendidikan tinggi dan berkualitas di bidang tertentu untuk mendukung operasi perusahaan secara efektif. Selain itu, tumbuhnya kesadaran masyarakat adat yang dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan status masyarakat mereka sebagai individu dari lapisan sosial ketiga melalui pendidikan.

Konsep Etika Politik diperkenalkan oleh Van Deventer, seorang humanis liberal terkemuka asal Belanda. Ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peran Pemerintah Kolonial Belanda dalam memburuknya kesejahteraan penduduk pribumi. Kritik tersebut dimuat dalam jurnal bernama *de Gids* pada tahun 1899 dengan judul "Een Eereschuld" yang artinya "Hutang Syukur" (Moedjanto: 1988: 21). Kritik ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda harus bertanggung jawab atas penurunan kesejahteraan penduduk lokal, yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang berfokus pada eksploitasi sumber daya. Pemerintah Belanda harus mengadopsi strategi politik etis yang mencakup pelaksanaan irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Van Deventer menyumbangkan nasihat kepada Pemerintah Belanda dalam rangka memajukan kesejahteraan individu. Ia mempromosikan peningkatan sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian, sekaligus mendukung gagasan perpindahan masyarakat dari pulau Jawa yang padat penduduk. Selain itu, ia yakin kedua program tersebut akan sia-

sia jika tidak ada peningkatan dalam pendidikan massal. Tujuan pendidikan di Hindia Belanda seharusnya adalah untuk membebaskan individu dari ketergantungan dan menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan mereka (Nasution, 2001: 16). Penerapan kebijakan etis ini diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J. B Van Heutsz, bekerja sama dengan penasihatnya, Prof. C. Snouck Hurgronje, seorang orientalis. Dukungan Snouck Hurgronje berujung pada pelaksanaan politik etis yang bertujuan menyatukan Hindia Belanda melalui penerapan kebijakan asimilasi dan asosiasi (Kaptein, 2003: 25 & 27). Snouck Hurgronje percaya bahwa penghapusan kolonialisme tidak bisa dihindari. Namun hal ini tidak berarti Hindia Belanda lepas dari Belanda. Negara Belanda terdiri dari dua bagian yang saling berhubungan: satu terletak di barat laut Eropa dan satu lagi tergabung di Asia Tenggara (Moedjanto: 1988: 23). Pendidikan muncul sebagai faktor penting dalam menentukan arah perkembangan politik di Hindia Belanda. Perluasan lembaga pendidikan telah membawa kemajuan yang signifikan dalam bidang pendidikan. Namun demikian, menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan saat ini tidak dapat dijadikan sebagai indikator yang dapat diandalkan mengenai efektivitas kebijakan etis. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat belum tercapai. Pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat adat menghadapi banyak kendala. Keuntungan dari pendidikan ini sebagian besar dialami oleh lapisan sosial ekonomi yang lebih tinggi. Pendidikan sengaja dirancang menjadi dasar dan tidak rumit bagi individu umum. Tidak ada jalur pendidikan yang tersedia untuk mencari pendidikan tinggi. Sekalipun ada kemungkinan, melakukan tugas ini merupakan tantangan karena adanya prasyarat yang ketat (Brugmans (ed), 1987: 185 & 188). Selain kendala akses pendidikan, terdapat juga aspek menguntungkan dalam adopsi pendidikan oleh negara-negara barat. Meskipun hanya dapat diakses oleh kalangan atas dan dirancang untuk menciptakan pekerja (Brugmans (ed), 1987: 185), sistem pendidikan ini pada akhirnya mengarah pada terbentuknya elit kontemporer. Elit kontemporer mengobarkan nasionalisme Indonesia yang menentang Barat.

Berkaitan dengan politik etika ini, pemerintah Belanda mendasarkan kebijaksanaan pendidikannya pada (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980: 12):

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat sebanyak mungkin diterapkan bagi golongan penduduk pribumi
2. Pendidikan rendah bagi golongan pribumi disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial.

Dua pendekatan terhadap penerapan gaya dan sistem pendidikan dan persekolahan didasarkan pada gagasan utama ini. Opsi pertama diperkirakan akan memenuhi permintaan akan pekerjaan pemerintah dan pekerja berpendidikan tinggi untuk memenuhi permintaan industri dan ekonomi. Tujuan dari jalur kedua adalah untuk menyediakan pekerja dengan

tingkat pendidikan rendah dan sedang. Tujuan pendidikan Belanda tidak diartikulasikan dengan jelas dalam pelaksanaannya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980: 12). Secara umum penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial ditandai dengan ciri-ciri antara lain (Nasution: 2001: 20): Gradualisme: Sifat ini mengacu pada niat pemerintah kolonial untuk mendidik penduduk pribumi secara progresif. Sejak Hindia Belanda (Indonesia) berada di bawah kekuasaan VOC, sesuai arahan de Heeren Zeventien, badan penguasa tertinggi VOC, telah diselenggarakan pendidikan pribumi. Karena tidak semua pulau di wilayah kekuasaan VOC menerima pendidikan pada saat itu, maka penduduk asli tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan tersebut (Mestoko, 1985: 78). Selain itu, VOC mengambil tindakan hati-hati agar pendidikan yang ditawarkan tidak merusak taktik monopoli dan merusak posisi mereka, sehingga pembangunan pendidikan lesu.

Pendekatan bertahap memastikan Belanda berada dalam posisi yang baik. Anak-anak pribumi mempunyai sedikit pilihan pendidikan, yang selalu menjamin bahwa anak-anak Belanda lebih maju. Ketakutan yang terus-menerus di kalangan warga Belanda adalah bahwa pendidikan yang berlebihan akan membahayakan pemerintah Belanda (Nasution, 2001: 23). Oleh karena itu, pendidikan generasi muda setempat berkembang lambat. Kesempatan bagi anak-anak masyarakat adat untuk bersekolah, khususnya sekolah menengah dan perguruan tinggi, sangatlah kecil. Dualisme adalah ciri lain yang digunakan pemerintah Belanda dalam pendidikan. Dengan membedakan antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi, maka terjadilah dualisme dalam pendidikan. Di Hindia Belanda, dualisme mengambil tempat dalam sistem pendidikan. Pendirian sekolah yang didirikan atas dasar sosial ekonomi dan kelompok etnis merupakan bukti penerapan karakteristik tersebut (Leirissa, 1985: 9). Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan kebahasaan. Bahasa Belanda digunakan di sekolah-sekolah dengan fokus Barat, sedangkan bahasa Melayu atau bahasa daerah lainnya digunakan di sekolah-sekolah pribumi. Peluang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi disediakan oleh sekolah-sekolah Belanda. Ada yang berpendapat bahwa peluang untuk memperoleh pendidikan tinggi dalam pendidikan masyarakat adat sangatlah kecil. Karena dilandasi oleh beragamnya tuntutan berbagai kelompok penduduk di Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda membentuk dualisme tersebut. Salah satu cara untuk memahami dualisme adalah akibat dari heterogenitas nasional Hindia Belanda yang sebenarnya. Menurut Kartodirdjo dan Suryo (1991: 6), hubungan yang berlaku pada saat itu adalah hubungan kolonialisme dengan hak-hak tersendiri. Keyakinan bahwa orang Belanda adalah ras yang lebih unggul berfungsi sebagai tameng terhadap penduduk lokal, yang semakin terpelajar dan membahayakan otoritas pemerintah kolonial. Sekolah yang didirikan berdasarkan prinsip dualisme sistem pendidikan kolonial Belanda. Ini termasuk Pendidikan Rendah, yang dipecah menjadi Sekolah

Rendah dan menggunakan bahasa Belanda dan bahasa lokal sebagai media pengajaran. Dua kelompok sasaran atau kelompok demografi yang berbeda menjadi fokus pembagian sekolah berdasarkan variasi linguistik.

Tiga kelompok sasaran terdiri dari Sekolah Rendah yang menawarkan pengajaran bahasa daerah: Pertama, Sekolah Bumiputera Kelas Dua (Inlandsche School) (Tweede Klasse), yang menawarkan waktu belajar lima tahun bagi penutur asli. Yang kedua adalah Sekolah Desa (Volkschool) yang berdurasi tiga tahun, yang dirancang untuk anak-anak pribumi yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Ketiga, Sekolah Lanjutan (Vervolgschool), sebuah program dua tahun yang dirancang untuk generasi muda Aborigin, merupakan perpanjangan dari sekolah desa. Selain itu, didirikan Sekolah Peralihan (Schakelschool) yang berfungsi sebagai sekolah peralihan tiga tahun antara sekolah desa dan sekolah dasar, dengan pengajaran dalam bahasa Belanda. Ini adalah sekolah lima tahun yang dirancang untuk anak-anak keturunan pribumi. Sekolah bagi keturunan kepala daerah (daerah) dan bangsawan ini dibentuk, tidak hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga untuk kepentingan Belanda sendiri. Sekolah Raja (Hoofden School) adalah nama yang diberikan kepada lembaga ini (Makmur et al., 1993: 67). Awalnya didirikan di Tondano pada tahun 1865 dan 1872, sekolah ini akhirnya dimasukkan ke dalam ELS atau HIS.

Dalam pengajaran tingkat lanjut, klasifikasi sekolah menjadi dua kategori berdasarkan variasi bahasa pengantar yang digunakan ditinggalkan. Semua pelatihan lanjutan bersifat Barat, menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan disusun menurut kriteria Barat, terutama Belanda. Dalam pendidikan lanjutan, beberapa negara tidak memiliki sekolah sendiri. Lulusan ELS, HIS, dan HCS dapat diterima dengan perlakuan yang sama di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) atau Hogere Burger School (HBS). Mengajar ke tingkat yang lebih tinggi bagi penduduk asli tidak ada (Brugmans (ed): 1987: 191). Penduduk asli baru dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah hanya dari sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasanya. Sekolah menengah yang diselenggarakan adalah MULO. MULO hanyalah sebuah sekolah dasar dengan program yang ditingkatkan. Pendirian sekolah ini mendapat reaksi baik dari masyarakat Indo-Belanda dan masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya ke HBS yang merupakan sekolah mahal. Untuk kelompok tertentu diharapkan MULO dikembangkan khusus untuk anak-anak Belanda. Namun pada akhirnya diputuskan bahwa MULO boleh diikuti oleh semua bangsa. Sekolah menengah lain yang ditawarkan adalah HBS. Sekolah menengah HBS dibentuk dengan tujuan mendidik siswanya untuk memasuki universitas dan menduduki jabatan yang tidak memerlukan ijazah universitas (Makmur, dkk, 1993: 62). Pendirian sekolah ini terpikir pada tahun 1839 dengan kesadaran akan perlunya adanya

sekolah menengah di Hindia Belanda agar generasi muda Belanda tidak perlu merantau ke Belanda. HBS di Hindia Belanda tercipta menurut pola yang ada di Belanda dan terus mempertahankan pola tersebut selama masih ada. Sekolah menengah lain yang dibangun adalah Algemene Middlebare School (AMS). Pandangan AMS adalah sebagai kelanjutan dari MULO dan sebagai pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk memasuki perguruan tinggi. Lembaga ini merupakan konsekuensi terbentuknya HIS dan MULO serta jawaban atas harapan masyarakat pribumi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. AMS memenuhi kebutuhan dan mendorong terwujudnya tujuan pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda.

Pendidikan Indonesia di Masa Pemerintahan Jepang

Awal pemerintahan Jepang di Hindia Belanda pada mulanya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Perasaan gembira ini muncul karena Jepang dianggap sebagai bangsa yang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Kepercayaan kepada Jepang sebagai bangsa pembebas juga semakin meningkat karena Jepang pandai mengumbar janji dan memberi harapan kepada rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan. Jepang sangat memahami situasi dan kondisi rakyat Indonesia bahwa semangat kebangsaan dan kemerdekaan sedang bergelora. Jepang yang kedatangannya mempunyai tujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi dari Indonesia. Untuk itu, Jepang melakukan pendekatan kepada rakyat Indonesia untuk mendapatkan simpatik dalam mencapai tujuannya itu. Untuk keberhasilan pendekatan yang Jepang lakukan, tentara Jepang melakukan propaganda (Pakpahan, 1979: 51). Salah satu propaganda ini dilakukan melalui pendidikan. Setelah tentara pendudukan Jepang mulai berkuasa, sangat sedikit sekolah yang diizinkan dibuka kembali (Makmur, dkk, 1993: 100). Selain itu pula persiapan-persiapan dalam penyelenggaraan pendidikan belum dilakukan. Terdapat banyak hambatan-hambatan yang harus diatasi terlebih dahulu. Beberapa hambatan itu diantaranya mengenai guru khususnya guru sekolah menengah. Secara kuantitas, masih kurangnya guru yang dibutuhkan dalam pengajaran di sekolah. Untuk mengatasi hal ini adalah dari berbagai tempat di seluruh daerah, guru-guru didatangkan untuk diberi pelajaran selama satu bulan. Hasil dari pendidikan ini selanjutnya disebarkan dan dipelajarkan kepada guru lainnya dan murid-murid sepulang mereka ke tempatnya masing-masing. Hambatan lainnya adalah mengenai buku-buku pelajaran. Semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang melarang dalam penggunaannya (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 87). Perbedaan yang sangat menyolok dalam penyelenggaraan pendidikan Jepang adalah pelaksanaan apel pagi (Lapian, 1992: 9). Semua pelajar dan guru berkumpul

di lapangan setiap pagi. Rutinitas pagi yang harus dilakukan lainnya adalah, Pertama, melakukan bango yaitu menghitung jumlah pelajar yang hadir untuk diketahui siapa saja yang absen. Kedua, melakukan seikerei yaitu memberikan penghormatan kepada Tenno Heika dengan membungkukkan badan ke arah timur laut. Selanjutnya melakukan taiso yaitu gerak badan selama 5 menit. Kewajiban melakukan taiso ini bukan hanya di sekolah-sekolah tetapi juga di kantor-kantor dan di desa-desa. Disiplin ini dipegang secara ketat. Pada masa pendudukan Jepang, bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah akan mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan sederhana, yaitu si pelanggar akan ditempeleng. Bukan guru yang melakukan penghukuman itu, melainkan teman sekelas yang biasanya ketua kelas atau kepala regu (Lapian, 1992: 9). Pendudukan Jepang dilaksanakan oleh pemerintahan militer. Karena pemerintahan militer ini, maka yang berlaku adalah sistem disiplin militer. Pelaksanaan disiplin militer di sekolah terlihat dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh murid. Jika guru masuk kelas untuk memberikan pelajaran, semua murid harus berdiri atas instruksi dari ketua kelas kemudian dilanjutkan dengan memberikan hormat kepada guru. Hal ini dilakukan pula setiap kali pelajaran usai. Terkadang, para murid harus berbaris secara militer. Semua pelajar pria dicukur rambutnya sampai gundul dan apabila berjalan di luar harus memakai topi seperti tentara (Lapian, 1992: 10). Kewajiban lain yang harus dijalankan adalah kinro-hoshi yaitu kerja bakti tetapi sama halnya seperti kerja paksa. Terkadang kerja bakti ini ditujukan untuk perang, misalnya memotong rumput di lapangan terbang yang berada di luar kota. Hal ini menyebabkan para pelajar harus menginap di bangsal tempat pekerja buruh. Keharusan melakukan pekerjaan ini hanya bagi pelajar yang memiliki fisik yang kuat (Lapian, 1992: 10). Selain latihan dalam disiplin yang bersifat kemiliteran, hal utama yang harus diikuti oleh murid sekolah adalah pelajaran dalam bahasa dan kebudayaan Jepang. Hal ini menjadi utama karena Jepang menganggap bahwa pengajaran bahasa Jepang dipaksakan kepada penduduk yang dikuasainya. Bagi para pelajar, bahasa Jepang ini dianggap perlu karena diperlukan agar bisa berkomunikasi dengan orang Jepang (Lapian, 1992: 11).

Tanpa disadari, unsur-unsur kebudayaan Jepang perlahan mulai terserap oleh para pelajar. Pelajaran yang diberikan dapat dikatakan mengenai kebiasaan dan keadaan Nippon (Jepang), semangat, sejarah bahkan segala kepercayaan harus menurut kepercayaan yang dianut Nippon. Kepercayaan yang diajarkan itu antara lain menyembah matahari, mendewakan kemuliaan Tenno Heika, kesucian Gunung Fuji, dan sebagainya (Pakpahan, 1979: 51). Pelajaran ilmu bumi dan sejarah Jepang semakin menambah pengetahuan tentang keadaan di Jepang. Selain masalah Jepang, diperkenalkan pula mengenai keadaan dalam Dai Toa Yociken (Daerah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya). Propaganda yang dilakukan

Jepang melalui sekolah merupakan usaha sadar Jepang untuk memudahkan pencapaian tujuannya. Dalam sekolah ini, sasaran utama adalah anak-anak sekolah yang masih murni yang belum memasuki kehidupan praktis sehingga belum mempunyai pertimbangan yang berdasarkan pengalaman. Semua yang dilakukan Jepang dikuatkan dan ditanamkan di dalam hati sanubari masyarakat Indonesia. Dalam sekolah-sekolah segala hal yang berkaitan dengan cara barat dihapuskan dan diganti dengan alam pikiran Nippon. Bahasa Belanda dan Inggris dilarang dan diganti dengan bahasa Nippon. Dalam propaganda ini pula pengertian peperangan mulai dipindahkan dari pengertian politik ke dalam soal agama dengan sembojannya "Perang Suci". (Pakpahan, 1979: 51 dan De Jonge (ed), 1991: 140) Hal ini ditanamkan dalam hati bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah di atas segalanya berdiri negara Nippon di bawah panji-panji Matahari Terbit yang disinari kemuliaan Tenno Heika. Penanaman doktrin ini menjadi tugas badan propaganda Jepang untuk memasukkannya ke dalam perhatian dan pikiran bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang adalah suatu pemerintahan yang memberikan kesempatan serba sulit. Kesulitan dalam pendidikan dirasakan oleh mahasiswa. Pemerintah militer Jepang menutup semua fakultas kecuali fakultas kedokteran yang dibuka kembali pada 1943. Jepang kemudian membuka "pusat-pusat pendidikan" tertentu yang dapat dikatakan belum bisa disebut sebagai lembaga-lembaga yang bersifat akademik.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Jepang mendasarkan pada prinsip:

1. Penataan kembali pendidikan atas dasar kesamaan dan keseragaman untuk seluruh kelompok etnis dan kelas sosial.
2. Unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan utama dan secara sistematis segala pengaruh Belanda dihapuskan di sekolah-sekolah.
3. Semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk mendoktrin rakyat Indonesia dalam rangka menyebarkan gagasan Kemakmuran Bersama Asia Tenggara di bawah pimpinan Jepang. Pada awal pendudukan Jepang, masyarakat merasakan kekosongan pendidikan. Ketika itu Jepang melakukan pembekuan pada semua kegiatan sekolah yang dianggapnya tidak sistematis yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kekosongan pendidikan yang dirasakan masyarakat Indonesia tidak berlangsung lama. Jepang mulai membuka kembali sekolah-sekolah yang dibekukan secara berangsur-angsur. Hal itu dilakukan karena Jepang menganggap bahwa melalui pendidikan mentalitas dan cara berpikir masyarakat dapat diubah dan dialihkan dari mentalitas Eropa kepada alam pikiran Nippon (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 87).

Karena adanya pelarangan penggunaan buku-buku yang berbahasa Belanda, pemerintah Jepang melakukan penyempurnaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai

bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran utama. Sedangkan bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah (Makmur, dkk, 1993: 101). Kebijakan dalam penggunaan bahasa ini dirasakan sulit oleh para guru. Para Guru mengalami kesulitan dalam memberikan pelajaran dalam bahasa Indonesia karena istilah-istilah ilmiahnya belum ada. Para guru yang tidak diberi buku acuan, atas kesadaran sendiri melakukan improvisasi dan membuat istilah sendiri. Terkadang pula mereka meminta bantuan dari guru Jepang dan memakai istilah Jepang. Istilah Jepang yang diantaranya dipakai dalam pelajaran ilmu ukur yang terjemahan bahasa Belanda meetkunde untuk geometri mulai beralih memakai istilah Jepang yakni Kika. Untuk aljabar, istilah Jepang yang dipakai adalah daisu (Lapian, 1992: 13). Kesulitan yang dirasakan oleh para guru kemudian ditanggapi oleh Jepang dengan membentuk Komisi untuk menyempurnakan bahasa Indonesia yaitu dengan sebutan Indonesia Goseibi linkai (Makmur, dkk, 1993: 87). Kesulitan ini pula yang mendorong bangsa Indonesia sendiri untuk melengkapi bahasanya dengan istilah-istilah baru.

Jenis sekolah yang diadakan oleh pemerintah pendudukan Jepang antara lain (Makmur, dkk, 1993: 103) :

1. Sekolah Rakyat

Mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar, tidak terdapat lagi diferensiasi seperti pada masa pemerintah Belanda. Semua sekolah dasar memiliki derajat sama yaitu Sekolah Rakyat. Jenjang pendidikan ini diseragamkan menjadi 6 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan, baik dalam hal isi maupun penyelenggaraannya. Sekolah Rakyat dapat ditemui di semua kota dan desa atau di tempat yang sebelumnya ada Sekolah Desa, Sekolah Kelas Satu, Sekolah Kelas Dua, HIS atau ELS.

2. Sekolah Menengah Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko)

Merupakan kelanjutan dari sekolah rakyat dengan masa belajar tiga tahun. Pada awal pendudukan Jepang, sekolah ini belum dibuka. Untuk memenuhi keinginan masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan, kemudian anak-anak dikumpulkan untuk mengikuti pelajaran bahasa Jepang. Jenjang sekolah ini hanya berada di ibukota-ibukota kabupaten yang besar.

Setelah Jepang mengorganisasikan sekolah, barulah dibuka SMP Satu, Dua, dan Tiga. SMP I di Prapatan, SMP II di Manggarai, dan SMP Putri di Salemba. Sekolah lanjutan yang dibuka di Jakarta hanya tiga SMP dan salah satunya SMP Putri itu (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 89). Sekolah Menengah Tinggi merupakan sekolah lanjutan umum tingkat atas yang memiliki masa belajar tiga tahun. Sekolah yang lebih dikenal dengan Sekolah Menengah Tinggi ini mulanya hanya terdapat di Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Pada tahun 1943 barulah dibuka kembali dua SMT di Bandung dan Surakarta. Sekolah ini ditujukan

agar para pelajar dapat melanjutkan sekolah tinggi. Pelajar yang diterima di sekolah ini harus memenuhi syarat yakni lulus mengikuti ujian penghabisan SMP negeri.

3. Sekolah Kejuruan Sekolah kejuruan yang dibentuk antara lain: Sekolah Pertukangan, Pertanian, Pelayaran, Sekolah Teknik Menengah dan Sekolah Pelayaran Tinggi.

4. Sekolah Guru Mengenai pendidikan guru, terdapat tiga jenis sekolah, yakni:

1. Sekolah Guru dua tahun setelah Sekolah Rakyat (Shoto Sihan Gakko)
2. Sekolah Guru empat tahun setelah Sekolah Rakyat (Guto Sihan Gakko)
3. Sekolah Guru enam tahun setelah Sekolah Rakyat (Koto Sihan Gakko)

Ketika pendudukan Jepang jenis pendidikan yang dibentuk cukup beragam. Pendidikan itu antara lain di bidang Teknik, Kedokteran, Keputrian, Pemerintahan, dan lain-lain. Hampir sekolah-sekolah itu harus disesuaikan dengan corak pemerintahan Jepang pada saat itu. Selain diberikan materi berdasarkan bidangnya masing-masing, setiap sekolah diwajibkan mengajarkan materi yang telah digariskan oleh pemerintah militer Jepang (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 92). Penyelenggaraan pendidikan pada masa itu pada umumnya memiliki mutu pendidikan yang tidak begitu baik. Hal itu dikarenakan yang diutamakan adalah penanaman disiplin kemiliteran dan pengetahuan Jepang. Penyelenggaraan pendidikan secara normal sebenarnya hanya berlangsung kira-kira setahun lebih. Pertengahan tahun 1943 mulai dijalankan latihan bahaya udara dengan intensif (Lapian, 1992: 14).

Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Era Penjajahan Belanda dan Masa Pemerintahan Jepang

Belanda tidak hanya memberikan pendidikan umum, melainkan didirikan pula pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan ini setingkat dengan pendidikan menengah. Pendidikan kejuruan yang diadakan antara lain pendidikan pertukangan, teknik pengantar bahasa Belanda, dagang, pertanian, dan kewanitaan. Didirikan pula Sekolah Keguruan karena permintaan atas kebutuhan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang secara kuantitas semakin bertambah. Pendidikan yang merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah yaitu pendidikan tinggi. Terdapat gagasan di kalangan penganjur politik etika untuk mendirikan pendidikan tinggi bagi golongan pribumi pada dasawarsa kedua abad ke-20. Pada tahun 1910 didirikan Perkumpulan Universitas Hindia yang memiliki tujuan untuk mendirikan perguruan tinggi baik melalui pemerintah atau swasta. Pendiariannya bermula atas inisiatif dari kalangan Indo-Eropa, tetapi kemudian didukung oleh orang-orang pribumi dan Belanda. Perguruan tinggi yang didirikan pada masa itu meliputi beberapa disiplin ilmu antara lain kedokteran, hukum, dan teknik.

Ketidaksistematisan pendidikan pribumi dilakukan pemerintah kolonial Belanda dalam

pelaksanaan pendidikan. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda yang ditujukan bagi anak-anak pribumi memiliki ciri khas bahwa masing-masing sekolah itu berdiri sendiri tanpa hubungan organisasi antara satu dengan yang lain. Selain itu kurangnya kesempatan yang diberikan pemerintah kolonial kepada anak pribumi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, pendidikan untuk anak-anak Belanda mempunyai organisasi yang lengkap yang memungkinkan mereka dapat mengikuti pendidikan di universitas melalui sekolah rendah dan menengah yang saling berhubungan erat. Setelah 1910, barulah mulai disadari bahwa tidak adanya hubungan antar sekolah untuk anak pribumi. Pemerintah Belanda kemudian mengambil tindakan dengan dikirimkannya surat dari Gubernur Jenderal Idenburg kepada Menteri Jajahan. Surat itu menjelaskan mengenai rencana untuk menyatukan sekolah yang terlepas tanpa adanya hubungan satu dengan lainnya agar menjadi satu kesatuan yang tersistematis.

Lalu Pendidikan di Masa Pemerintahan Jepang pada saat itu, selain diberikan materi berdasarkan bidangnya masing-masing, setiap sekolah diwajibkan mengajarkan materi yang telah digariskan oleh pemerintah militer Jepang (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 92). Penyelenggaraan pendidikan pada masa itu pada umumnya memiliki mutu pendidikan yang tidak begitu baik. Hal itu dikarenakan yang diutamakan adalah penanaman disiplin kemiliteran dan pengetahuan Jepang. Penyelenggaraan pendidikan secara normal sebenarnya hanya berlangsung kira-kira setahun lebih. Pertengahan tahun 1943 mulai dijalankan latihan bahaya udara dengan intensif (Lapian, 1992: 14).

SIMPULAN

Pendidikan di Indonesia mempunyai dua periode penerapan yang berbeda dalam sejarah pertumbuhannya sebelum kemerdekaan Indonesia: pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Perjalanan pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua fase berbeda, yang masing-masing fase ditandai dengan pendekatan implementasinya yang unik. Pada masa penjajahan Belanda, penyelenggaraan pendidikan bercirikan bertahap, dualisme, pengawasan terpusat yang kuat, asas konkordansi, dan pengajaran kepada masyarakat setempat yang tidak sistematis. Otoritas pendidikan Indonesia menentang penerapan pendidikan ini dan malah mengatur pendidikan bagi penduduk asli berdasarkan kebutuhan dan kepribadian khusus mereka. Termasuk pendirian lembaga seperti Taman Siswa, sekolah Muhammadiyah, dan Pendidikan INS Kayu Tanam. Penerapan pendidikan terbatas yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda menyebabkan munculnya kelompok sosial baru yang diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan

Barat. Kelompok yang baru terbentuk ini terdiri dari individu-individu berpendidikan tinggi yang pada akhirnya akan memimpin organisasi-organisasi kontemporer, yang akan menjadi instrumen untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dilaksanakan dengan disiplin militer yang ketat karena yang berkuasa adalah pemerintahan militer. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mengamankan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya dan untuk melatih anak-anak Indonesia agar dapat terlibat dalam konflik tersebut di masa depan. Jepang memasukkan teori militer ke dalam semua aspek kurikulumnya. Selain itu, Jepang menerapkan larangan penggunaan bahasa Belanda dan sebagai gantinya mengambil kebijakan untuk mendorong pembangunan bahasa Indonesia. Kurikulum pembelajaran untuk penduduk asli secara bertahap memasukkan sejarah, geografi, dan budaya Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B Lopian..“Pengalaman Bersekolah di Masa Perang” dalam Simposium on Modern Indonesia History. Diselenggarakan oleh LIPI pada 9 November 1992 di Jakarta.
- Abbas, A. (2018). Pendidikan di Indonesia pada Masa Jepang. Dalam Ash-Shahaba: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4(1), 62-75.
- Brugmans, I. J dan Baudet, H (ed). (1987). Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djojonegoro, Wardiman. (1996). 50 Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Depdikbud.
- Fuadi, D. A. R., & al Anshori, D. Ri. (2023). Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan li (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang). Global Education Journal, 1, 267–284.
- Harkantiningasih, Naniek. “Ceramics Along The Spice Trade Route in the Indonesian Archipelago in the 16th-19th century” dalam Jurnal Forum Arkeologi, Vol. 26, No. 1. 2013.
- Harkantiningasih, Naniek. “Pengaruh Kolonial Di Nusantara” Kalpataru: Majalah Arkeologi. Vol. 23, No. 1, 2014.
- Hasnida, H. (2017). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(2), 237–256. Diambil dari
- Hudaidah, & Karwana, M. A. P. (2021). PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA PENDUDUKAN JEPANG. Danadyaksa Historica, 1(2), 97–104.

- Makmur, Djohan, Pius Suryo Haryono, et al., (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Moedjanto, G. (1991). Indonesia Abad ke-20. Jilid I. Jakarta: Kanisius.
- Nasution, S. (2001). Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pakpahan, G. (1979). 1261 Hari Di bawah Sinar Matahari Terbit. Cetakan ke-2. Jakarta: Marintan Djaya.
- Purwanti, N. (2018). pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945 di Rembang. Jurnal Noken, 77-94.
- Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan, 8(1), 10–23.